



Analisis pemberitaan kasus korupsi di Indonesia di Tempo.co tahun 2022-2024

**Kevin Albar Yudistira¹, Nurul Dwi Saputri¹, Syifa Oktavia¹, Dwi Sari Ariyanti¹,
Muhammad Isya Al Fitri¹, Balighah Faiqah Putri¹, Ratna Dewi¹**

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 5/12/2025

Direvisi 10/02/2026

Diterima 24/02/2026

Diterbitkan 01/03/2026

Kata kunci:

Korupsi

Analisis Isi

Tempo.co

Media Online

Indonesia

Keywords:

Corruption

Content Analysis

Tempo.co

Online Media

Indonesia

*This is an open access article
under the [CC BY-NC](#) license.*



Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus korupsi di Indonesia tahun 2022-2024: analisis isi pada pemberitaan [Tempo.co](#). Menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan 108 berita yang dipilih melalui teknik *Census Sampling* dari tahun 2022 sampai 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun banyaknya pemberitaan kasus korupsi adalah 2022 (42,6%), bulan banyaknya pemberitaan kasus korupsi adalah Agustus (10,2%), dominasi jenis kelamin pelaku adalah laki-laki (92,6%), jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan anggaran (52,8%), lembaga penegak hukum yang sering menangani adalah KPK (62%), pulau paling banyak terjadi kasus korupsi adalah Jawa (66,7%), dan provinsi paling banyak terjadi kasus korupsi adalah DKI Jakarta (48,1%). Penelitian ini menunjukkan bahwa topik korupsi masih merupakan isu serius dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Abstract

This study examines corruption cases in Indonesia from 2022 to 2024 by conducting a content analysis of Tempo.co news reports. The study employed a quantitative content analysis approach, examining 108 news reports selected through census sampling techniques from 2022 to 2024. The results show that the year with the highest number of corruption case news reports was 2022 (42.6%), the month with the most corruption case news coverage was August (10.2%), the dominant gender of perpetrators was male (92.6%), the most common type of corruption crime was budget misuse (52.8%), the law enforcement agency that most often handled the cases was the Corruption Eradication Commission (62%), the island with the most corruption cases was Java (66.7%), and the province with the highest number of corruption cases was DKI Jakarta (48.1%). The Study highlights that corruption is still a very serious issue in the government of Indonesia.

Penulis Korespondensi

Ratna Dewi

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Brubahan, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 5312

Email: ratna.dewi0504@unsoed.ac.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi persoalan serius yang masih dihadapi oleh Indonesia. Secara formatif, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Agus Wibowo dkk., 2022, hlm. 166). Dengan kutipan tersebut menekankan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan uang negara memiliki dampak yang lebih kompleks dari kerugian negara hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap negara.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan dinamika yang berlawanan. Pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia dengan kerugian negara Rp 42,7 triliun. Pada tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi tetapi dengan kerugian negara yang menurun pada Rp 28,4 triliun. Lalu pada tahun 2024 jumlah kasus korupsi di Indonesia menurun drastis menjadi 364 kasus korupsi dengan kerugian negara yang melonjak hingga Rp 279,9 triliun. Temuan data ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia dalam kenyataan membawa nilai kerugian negara yang semakin besar, mengindikasikan kemungkinan lemahnya pengawasan, proses hukum, atau transparansi publik sehingga kasus korupsi yang terjadi di Indonesia cenderung fluktuatif.

Dalam melihat konteks perkembangan kasus korupsi di Indonesia, media massa, terutama media daring memiliki peran penting sebagai penyedia informasi publik dan pengawas sosial. Media dikatakan sebagai sumber utama untuk memperlihatkan dinamika kasus korupsi (jurnalistik), yang memperlihatkan aktor yang terlibat dan menggambarkan peran lembaga hukum (Saragih, 2018, hlm. 81–82). Media massa memiliki pengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku, serta sebuah opini publik terhadap informasi atau fakta yang disajikan. Dengan akses informasi yang lebih cepat dan luas, media daring berpotensi memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran publik mengenai kasus korupsi.

[Tempo.co](https://www.tempo.co) merupakan salah satu media daring yang memiliki reputasi kuat dalam investigasi yang meliputi kasus hukum dan politik. Sejak berdiri pada tahun 1971, Tempo dikenal sebagai lembaga pers independen yang kritis dan tajam terhadap kekuasaan (Nugroho & Lukmantoro, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh stella & Rusdi (2022) menunjukkan bahwa [Tempo.co](https://www.tempo.co) secara konsisten menerapkan standar jurnalisme yang tinggi dalam menulis sebuah berita secara tajam dan berimbang, sehingga layak untuk memetakan perkembangan kasus korupsi di Indonesia dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan pemahaman awal mengenai pola korupsi di Indonesia. Martiqoh dkk. (2023) mengidentifikasi karakteristik pelaku korupsi berdasarkan data KPK dan menemukan bahwa mayoritas pelaku adalah laki-laki yang menjabat sebagai anggota DPRD, kepala daerah, dan PNS, namun cakupan penelitian tersebut terbatas karena hanya memfokuskan pada profil pelaku. Penelitian Arui dkk. (2024) menilai kinerja lembaga antikorupsi dan menegaskan perlunya peningkatan efektivitas KPK, tetapi belum mengulas pemberitaan kasus korupsi secara mendalam. Sementara itu, Arnafama dkk. (2025) menyoroti peran media massa dalam pemberitaan kasus korupsi, tetapi belum melakukan identifikasi rinci terkait jenis tindak pidana korupsi yang diberitakan. Temuan dari Launa & Tawaang (2021) juga menunjukkan bahwa pemberitaan media, termasuk [Tempo.co](https://www.tempo.co), masih kurang menyoroti peran lembaga penegak hukum, khususnya KPK.

Melihat berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini berusaha menghadirkan pemetaan yang lebih luas mengenai pemberitaan kasus korupsi di [Tempo.co](https://tempo.co) pada tahun 2022–2024. Penelitian dilakukan dengan analisis isi untuk mengkaji frekuensi berita, karakteristik pelaku, jenis tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum yang paling banyak disebut, serta wilayah yang paling sering diberitakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan terukur mengenai representasi kasus korupsi di Indonesia melalui media daring, sekaligus melengkapi kekosongan dalam penelitian terdahulu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi untuk menganalisis secara sistematis dan objektif. Fokus penelitian terletak pada pemberitaan kasus korupsi di [Tempo.co](https://tempo.co) periode 2022-2024 yang mencakup frekuensi pemberitaan, karakteristik pelaku, jenis tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum, dan persebaran wilayah kasus korupsi berdasarkan pulau dan provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif untuk menggambarkan kecenderungan dan karakteristik pemberitaan kasus korupsi di media [Tempo.co](https://tempo.co) secara terukur. Populasi penelitian mencakup seluruh berita kasus korupsi yang diunggah pada portal pemberitaan online [Tempo.co](https://tempo.co) selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Sampel diambil menggunakan *Census Sampling* (sampel sensus atau sampel jenuh) yang artinya semua artikel berita kasus korupsi dalam periode 2022-2024 yang memenuhi kriteria akan dipilih menjadi sampel. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif dengan mengamati berita tanpa berinteraksi langsung, serta melalui pengkodean yang berisi kategori dan indikator terkait berita kasus korupsi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena pemberitaan kasus korupsi di [Tempo.co](https://tempo.co) selama tahun 2022 hingga 2024 secara sistematis, faktual, dan akurat dengan bantuan perhitungan statistik sederhana seperti frekuensi dan persentase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menguraikan temuan data yang diperoleh dari 108 sampel berita mengenai kasus korupsi yang dimuat di [Tempo.co](https://tempo.co) untuk mengidentifikasi karakteristik yang muncul serta mengukur frekuensi elemen-elemen tertentu. Berita tersebut dipilih dengan menggunakan *Census Sampling* (sampel sensus atau sampel jenuh). Berita yang dipilih adalah berita mengenai kasus korupsi yang dimuat di [Tempo.co](https://tempo.co) selama periode tahun 2022 hingga 2024. Sampel yang digunakan telah memenuhi kriteria untuk mengkaji waktu pemberitaan, jenis kelamin pelaku, jenis kasus korupsi, lembaga penegak hukum, serta asal wilayah dari kasus korupsi yang diberitakan.

3.1. Tahun Banyaknya Kasus Korupsi yang diberitakan oleh [Tempo.co](https://tempo.co) selama 2022-2024

Untuk mengetahui tahun banyaknya kasus korupsi yang diberitakan oleh [Tempo.co](https://tempo.co), penelitian ini menganalisis jumlah artikel terkait korupsi yang dipublikasikan setiap tahun dalam rentang 2022-2024. Tabel berikut menyajikan distribusi frekuensi pemberitaan per tahun sebagai indikator intensitas terjadinya kasus korupsi.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tahun Pemberitaan Korupsi

Tahun	Frekuensi	Presentase
2022	46	42,6%
2023	33	30,6%
2024	29	26,9%
Total	108	100%

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa tahun 2022 merupakan periode dengan jumlah kasus korupsi yang paling banyak diberitakan yaitu sebanyak 46 kasus atau 42,6 % dari total keseluruhan 108 kasus yang dianalisis. Persentase ini menempatkan tahun 2022 sebagai tahun dengan intensitas pemberitaan korupsi tertinggi dibandingkan 2023 yang hanya berjumlah 33 kasus (30,6%) dan 2024 dengan 29 kasus (26,9%). Data tersebut menunjukkan bahwa publikasi pemberitaan mengenai kasus korupsi mengalami puncaknya pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan kasus korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Apabila dikaitkan dengan konteks nasional, tren tersebut sejalan dengan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, nilai IPAK tercatat sebesar 3,93, kemudian menurun menjadi 3,92 pada tahun 2023. Meski perbedaannya tipis, penurunan ini mengisyaratkan melemahnya sensitivitas sosial terhadap praktik korupsi serta penurunan kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tingginya jumlah pemberitaan pada tahun 2022 dapat mencerminkan fase meningkatnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi, sementara penurunan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan meredupnya ekspos dan respons sosial terhadap fenomena tersebut.

3.2. Bulan Banyaknya Kasus Korupsi yang Diberitakan oleh [Tempo.co](#) Selama Tahun 2022-2024

Untuk mengidentifikasi bulan dengan jumlah pemberitaan kasus korupsi paling tinggi dalam periode 2022–2024, penelitian ini menelusuri frekuensi unggahan berita korupsi oleh [Tempo.co](#) pada setiap bulan selama tiga tahun tersebut. Tabel di bawah ini merangkum sebaran jumlah berita per bulan sebagai acuan untuk melihat pola intensitas pemberitaan kasus korupsi.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Bulan Pemberitaan Korupsi

Bulan	Frekuensi	Presentase
Januari	9	8,3%
Februari	5	4,6%
Maret	10	9,3%
April	4	3,7%
Mei	9	8,3%
Juni	9	8,3%
Juli	10	9,3%
Agustus	11	10,2%
September	10	9,3%
Oktober	8	7,4%
November	18	16,7%
Desember	5	4,6%
Total	108	100%

Berdasarkan Tabel 2 mengenai distribusi frekuensi bulan pemberitaan kasus korupsi, diketahui bahwa November merupakan periode dengan jumlah pemberitaan tertinggi, yaitu

sebanyak 18 kasus atau 16,7% dari total 108 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh bulan Agustus dengan 11 kasus (10,2%), serta Maret, Juli, dan September yang masing-masing berjumlah 10 kasus (9,3%). Sementara itu, bulan April menunjukkan jumlah pemberitaan terendah, yakni hanya 4 kasus (3,7%). Secara kumulatif, bulan November telah terakumulasi sebesar 95,4% pemberitaan kasus korupsi, yang menunjukkan bahwa mayoritas publikasi kasus terjadi sebelum memasuki akhir tahun. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai dinamika temporal pemberitaan korupsi dan menunjukkan bahwa isu tersebut tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh konteks waktu tertentu.

Fluktuasi tersebut sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (2021), yang menjelaskan bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Aktivitas pengungkapan kasus cenderung meningkat pada periode-periode tertentu, khususnya ketika pemerintah memasuki fase evaluasi anggaran dan pemeriksaan belanja publik. Terlihat dari tahun sebelumnya, ICW mencatat bahwa pada Semester I tahun 2021 terdapat 149 kasus korupsi yang ditindak, dan sebagian besar terjadi pada bulan-bulan yang berdekatan dengan agenda audit serta penelaahan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika administrasi, siklus anggaran, dan momentum penegakan hukum berperan dalam mendorong meningkatnya pengungkapan kasus pada periode tertentu, khususnya menjelang akhir tahun.

3.3. Karakteristik Pelaku Kasus Korupsi berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pemberitaan [Tempo.co](#) Tahun 2022-2024

Penelitian ini menganalisis kasus korupsi dengan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kelamin pelaku sebagaimana disajikan dalam pemberitaan [Tempo.co](#). Tabel berikut menampilkan proporsi setiap kategori jenis kelamin guna menggambarkan kecenderungan yang muncul dalam pemberitaan kasus korupsi.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pelaku Korupsi

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	100	92,6%
Perempuan	8	7,4%
Total	108	100%

Berdasarkan Tabel 3, distribusi kasus korupsi dalam pemberitaan [Tempo.co](#) tahun 2022–2024 menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan antara jenis kelamin pelaku. Dari total 108 kasus yang dianalisis, pelaku laki-laki mendominasi dengan 100 kasus (92,6%), sedangkan pelaku perempuan hanya tercatat dalam 8 kasus (7,4%).

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberitaan mengenai kasus korupsi pada periode tersebut sebagian besar berkaitan dengan pelaku laki-laki. Dominasi tersebut dapat mencerminkan beberapa faktor, seperti komposisi jabatan publik yang masih lebih banyak diisi oleh laki-laki, sehingga peluang terlibat dalam tindak pidana korupsi pun lebih tinggi. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi relatif kecil, sebagaimana terlihat dari persentase yang jauh lebih rendah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Djuwita (2018) yang menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam jabatan publik dan posisi pengambilan keputusan membuat peluang keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Fasya (2019) juga menemukan bahwa rendahnya angka keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi berkaitan dengan terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis yang mengelola anggaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Universitas Katolik Parahyangan (2017) yang menjelaskan bahwa jabatan dengan otoritas finansial yang memiliki risiko korupsi lebih besar, masih cenderung diisi oleh laki-laki.

Oleh karena itu, ketimpangan angka pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin dalam pemberitaan [Tempo.co](https://www.tempo.co) dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur kekuasaan yang masih didominasi laki-laki, sehingga memberikan mereka peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, pola distribusi ini memperlihatkan bahwa representasi pelaku korupsi dalam pemberitaan cenderung tidak merata dan lebih terpusat pada kelompok laki-laki.

3.4. Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Paling Sering Muncul dalam Pemberitaan [Tempo.co](https://www.tempo.co) selama Tahun 2022-2024

Penelitian ini menganalisis kategori tindak pidana korupsi yang paling sering diberitakan dalam pemberitaan [Tempo.co](https://www.tempo.co) selama tahun 2022–2024. Tabel di bawah ini menyajikan distribusi frekuensi jenis tindak pidana korupsi yang muncul dalam pemberitaan [Tempo.co](https://www.tempo.co).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jenis Kasus Korupsi

Jenis Tindak Korupsi	Frekuensi	Presentase
Kasus Penyuapan	36	33,3%
Penyalahgunaan Anggaran	57	52,8%
Korupsi Ekspor Impor	8	7,4%
Pemerasan	1	0,9%
Pencucian Uang	4	3,7%
Penggelapan	2	1,9%
Total	108	100%

Berdasarkan pada Tabel 4, jenis tindak pidana korupsi yang paling sering diberitakan oleh Tempo.co pada tahun 2022-2024 adalah penyalahgunaan anggaran, dengan proporsi mencapai 52,8% dari total kasus. Dominasi penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa persoalan tata kelola keuangan publik masih menjadi isu utama yg menonjol dalam pemberitaan media. Kasus-kasus ini umumnya berkaitan dengan praktik penyelewengan dana pemerintah, mark-up anggaran, penyalahgunaan dana hibah, dan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Jenis korupsi berikutnya yang juga banyak diberitakan adalah penyuapan, yang mencapai 33,3% dari keseluruhan data. Penyuapan seringkali muncul karena adanya hubungan transaksional antara pejabat publik dan pihak swasta untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik dalam bentuk perizinan, proyek, maupun keputusan administratif. Tingginya pemberitaan terkait suap menegaskan bahwa mekanisme transaksi ilegal ini masih menjadi modus paling klasik dan paling mudah terdeteksi dalam penegakan hukum.

Temuan pada penelitian ini memiliki kesesuaian dengan laporan pemantauan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam laporan Tren Penindakan Korupsi 2021, ICW menemukan bahwa penyalahgunaan anggaran merupakan modus korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, diikuti oleh penyuapan sebagai salah satu modus yang juga menonjol. Laporan tersebut menjelaskan bahwa tingginya angka penyalahgunaan anggaran disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tingginya akses pejabat publik terhadap sumber daya keuangan negara, sehingga membuat kasus-kasus tersebut lebih sering terungkap dan mendapat sorotan media. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa dominasi penyalahgunaan anggaran dan penyuapan dalam pemberitaan Tempo.co tidak hanya mencerminkan dinamika liputan media, tetapi juga menggambarkan tren faktual penindakan korupsi secara nasional.

Sementara itu, kategori korupsi lain seperti korupsi ekspor-impor (7,4%), pemerasan (3,7%), pencucian uang (3,7%), dan penggelapan (1,9%) muncul dalam proporsi yang lebih kecil. Rendahnya persentase kasus-kasus tersebut dapat disebabkan oleh sifatnya yang lebih spesifik, lebih sulit diungkap, atau tidak selalu melibatkan praktik birokrasi pemerintahan secara langsung, sehingga tidak mendapatkan ekspos media sebesar dua kategori utama sebelumnya. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan penyuapan tetap menjadi dua jenis tindak pidana korupsi yang paling dominan dalam liputan [Tempo.co](https://tempo.co) selama tahun 2022–2024, sekaligus memperkuat pola yang juga ditemukan dalam laporan pemantauan ICW.

3.5. Lembaga Penegak Hukum yang Sering Diberitakan Menangani Kasus Korupsi pada [Tempo.co](https://tempo.co) selama Tahun 2022–2024

Penelitian ini menganalisis lembaga penegak hukum yang paling sering diberitakan dalam penanganan kasus korupsi di [Tempo.co](https://tempo.co) selama periode 2022–2024. Tabel dibawah ini menyajikan proporsi lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi dalam pemberitaan [Tempo.co](https://tempo.co).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga	Frekuensi	Presentase
Komisi Pemberantasan Korupsi	67	62%
Kejaksaan Agung	22	20,4%
Kejaksaan Negeri	8	7,4%
Kejaksaan Tinggi	7	6,5%
Kepolisian	4	3,7%
Total	108	100%

Berdasarkan data pada Tabel 5, kasus korupsi yang diberitakan Tempo.co selama tahun 2022–2024 paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni mencapai 62% dari seluruh kasus. Dominasi ini dapat dijelaskan oleh satu faktor utama, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*.

Menurut artikel dalam jurnal PETITA (2023), KPK dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak lagi efektif dalam memberantas korupsi yang semakin meluas, sehingga diperlukan lembaga baru yang memiliki kewenangan luas, bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk dapat bekerja secara maksimal. Independensi dan mandat khusus inilah yang membuat KPK menangani lebih banyak kasus korupsi dibanding lembaga lain, terutama kasus yang berskala besar, sistematis, dan melibatkan aktor *high profile*. Karena karakteristik tersebut, kasus-kasus yang ditangani KPK lebih sering menjadi objek pemberitaan media, termasuk [Tempo.co](https://tempo.co) sehingga lembaga ini muncul sebagai institusi penegak hukum yang paling dominan dalam liputan kasus korupsi selama periode penelitian.

3.6. Lembaga Penegak Hukum yang Sering Diberitakan Menangani Kasus Korupsi pada [Tempo.co](https://tempo.co) selama Tahun 2022–2024

Untuk mengetahui pulau dengan kasus korupsi paling banyak diberitakan oleh [Tempo.co](https://tempo.co), penelitian ini menganalisis terkait banyaknya kasus korupsi berdasarkan pulau yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2022–2024. Tabel berikut menyajikan distribusi frekuensi kasus korupsi berdasarkan pulau yang ada di Indonesia untuk melihat kecenderungan yang muncul dalam pemberitaan.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pulau Banyaknya Kasus Korupsi

Pulau	Frekuensi	Presentase
Jawa	72	66,7%
Sumatera	13	12%
Kalimantan	9	8,3%
Sulawesi	4	3,7%
Papua	4	3,7%
Bali	2	1,9%
Nusa Tenggara	1	0,9%
Maluku	3	2,8%
Total	108	100%

Informasi yang diperoleh dari tabel tersebut mengenai persebaran kasus korupsi berdasarkan pulau dalam pemberitaan [Tempo.co](https://tempo.co). Dari Tabel 6 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang terjadi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah kasus korupsi paling banyak yaitu sebesar 72 kasus dengan persentase 66,7 % dibandingkan pulau lainnya dari total keseluruhan kasus yang dianalisis yaitu 108 kasus. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus korupsi yang diberitakan terjadi di Pulau Jawa. Hal ini berbanding terbalik dengan Pulau di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi (3,7%), Papua (3,7%), Maluku (2,8%), Bali (1,9%), dan Nusa Tenggara (0,9%) yang memiliki jumlah kasus lebih sedikit.

Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Pulau Jawa sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Juliarini (2019), bahwa Jawa merupakan wilayah dengan aktivitas pembangunan dan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Misalnya konsentrasi penduduk, kegiatan perekonomian, dan aktivitas pemerintahan yang tinggi menjadikan Jawa sebagai pusat kegiatan nasional yang strategis. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap terjadinya kasus korupsi dibandingkan pulau lainnya di Indonesia.

3.7 Provinsi dengan Kasus Korupsi yang Paling Banyak Diberitakan [Tempo.co](https://tempo.co) selama Tahun 2022-2024

Untuk mengetahui provinsi mana yang paling sering muncul dalam pemberitaan kasus korupsi selama periode 2022–2024, penelitian ini mengamati frekuensi berita korupsi yang dipublikasikan [Tempo.co](https://tempo.co) berdasarkan wilayah pemberitaannya. Tabel berikut menyajikan proporsi kasus berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia untuk melihat kecenderungan yang muncul dalam pemberitaan.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Provinsi Banyaknya Kasus Korupsi

Provinsi	Frekuensi	Presentase
DKI Jakarta	52	48,1%
Jawa Tengah	3	2,8%
Jawa Timur	6	5,6%
Jawa Barat	9	8,3%
Banten	2	1,9%
Sumatera Utara	2	1,9%
Sumatera Selatan	4	3,7%
Riau	3	2,8%

Jambi	1	0,9%
Bengkulu	1	0,9%
Kepulauan Bangka Belitung	1	0,9%
Aceh	1	0,9%
Kalimantan Tengah	1	0,9%
Kalimantan Timur	5	4,6%
Kalimantan Selatan	3	2,8%
Sulawesi Selatan	2	1,9%
Sulawesi Tenggara	2	1,9%
Bali	2	1,9%
Nusa Tenggara Barat	1	0,9%
Maluku	3	2,8%
Papua	2	1,9%
Papua Barat	1	0,9%
Papua Tengah	1	0,9%
Total	108	100%

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, terlihat bahwa kasus korupsi yang diberitakan Tempo.co pada tahun 2022–2024 paling banyak terjadi di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 52 kasus atau 48,1% dari total keseluruhan kasus yang dianalisis. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah kasus korupsi yang muncul dalam pemberitaan berasal dari wilayah ibu kota. Kondisi ini dapat dipahami karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi, serta lokasi berbagai lembaga negara, sehingga potensi terdeteksinya praktik korupsi menjadi jauh lebih besar dibandingkan provinsi lainnya.

Penelitian Rini dan Damiati (2017) juga menemukan bahwa tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia bervariasi secara signifikan antar daerah. Provinsi yang memiliki struktur pemerintahan lebih besar cenderung menunjukkan kasus korupsi per kapita yang lebih tinggi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, sehingga daerah dengan birokrasi yang lebih kompleks memiliki peluang penyimpangan yang lebih besar. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian ini, di mana provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih sering muncul dalam pemberitaan kasus korupsi oleh Tempo.co selama periode 2022–2024.

4. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan yang ditetapkan dalam Pendahuluan, yaitu menggambarkan pola pemberitaan kasus korupsi di Tempo.co selama 2022–2024. Temuan menunjukkan bahwa intensitas pemberitaan tertinggi berada pada tahun 2022 dan bulan November. Pelaku korupsi dalam pemberitaan didominasi laki-laki, dengan penyalahgunaan anggaran sebagai jenis tindak pidana yang paling sering muncul. KPK tercatat sebagai lembaga penegak hukum yang paling banyak disebut, sementara wilayah pemberitaan terbanyak berasal dari Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Hasil ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan, rumusan masalah, dan temuan penelitian.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu sumber media dan bersifat deskriptif, sehingga belum menggambarkan variasi pemberitaan antar-media maupun faktor penyebab yang lebih mendalam. Kedepannya, penelitian dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak media, menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif, atau mengaitkan temuan dengan kondisi sosial dan politik yang memengaruhi dinamika kasus korupsi. Temuan ini berpotensi diterapkan dalam penyusunan kebijakan antikorupsi, peningkatan literasi media, serta evaluasi kinerja lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afnanda, M., Widilestari, C., Aji, R., Hasni, K., Medica, S. T. F., Abas, M., Nopianti, W., Mujib, F., Pranajaya, S. A., & Amane, A. P. O. (2023). *Pendidikan anti korupsi, anti narkoba, dan deradikalisasi*. Padang: CV Getpress Indonesia.
- Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset (*The role of law enforcement agencies in the asset confiscation process*). *Jurnal Hukum*, 7(3), 1601–1615.
- Arianto, A. F. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia: *Corruption criminal law enforcement challenges in Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 7(2), 6–7.
- Ariyanto, Y. W. B., Haniyah, & Handayani, Budi. (2019). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bebas Impor. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 740 - 754.
- Arnafama, S. P. H., Lazuardi, M. A., Putri, P., Putri, I. L., & Hayat, M. A. (2025). Peran media massa dalam pemberitaan: Kasus korupsi di Kalimantan Selatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 2519–2529.
- Arui, S., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Evaluasi kinerja lembaga anti-korupsi dalam mengatasi korupsi di Indonesia. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 1–20.
- Badan Pusat Statistik. (2023, 6 November). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92 menurun dibandingkan IPAK 2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Djuwita, A. (2018). *Politisi perempuan dalam bingkai media: Analisis framing Robert Entman atas pemberitaan politisi perempuan di media cetak*. 5–6.
- Eriyanto. (2015). *Analisis isi: Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Estrella, N., & Rusdi, F. (2022). Pengaruh minat pembaca media online Tempo.co terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada generasi Z. *Koneksi: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 6(2), 408–415.
- Fasya, S. A. (2019). Citra perempuan dan korupsi: Analisis konstruksi realitas media. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 17–18.
- Golonggom, M. N., Manopo, B., & Olii, A. (2021). Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen*, Vol. X, No. 5, April 2021.
- Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Hukum*, 3(2), 402–411.
- Husein, U. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2022–2024*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Isnaeni, E. M., Prasetyo, D., & Nuraini, L. (2023). Karakteristik koruptor di Indonesia tahun 2018–2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 55–66.

- Juliarini, A. (2019). Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal STIA LAN*, 10(2), 84–94.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 23 Oktober). *Setop pungutan liar! Ini termasuk korupsi terkait dengan pemerasan*. ACLC KPK. Diakses pada 19 November dari: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231023-setop-pungutan-liar-ini-termasuk-korupsi-terkait-dengan-pemerasan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, 19 Desember). *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 perkara korupsi, lima sektor jadi fokus utama*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 5 November dari: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Launa, & Tawaang, F. (2021). Pemberitaan kasus korupsi politik dalam konstruksi media. *Jurnal The Source*, 3(2), 76–89.
- Mapanawang, Y. M., Sepang, M., & Wulur, N. (2023). Delik Pemerasan sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*.
- Martiqoh, I. E., Prasetyawati, E., & Prasetyo, I. (2023). Karakteristik koruptor pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018–2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1), 77–96. Universitas Jenderal Soedirman.
- Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German Ideology*. International Publishers.
- Megawati, Rahman, S., & Razak, A. (2024). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5, 570–588.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. L., & Abra, E. H. (2023). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2), 172–187.
- Nugroho, N. N. K., & Lukmantoro, T. (2025). *Analisis framing kasus korupsi Harvey Moeis: Kajian terhadap konten berita di portal berita daring Tempo.co*. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro.
- Putra, N. R., & Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Jurnal Hukum Syarieff*, 7(2), 15–26.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains*, 5(2), 47–54.
- Ramadhan, M. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rini, R., & Damianti, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73–90.
- Saragih, M. Y. (2018). Media massa dan jurnalisme: Kajian pemaknaan antara media massa cetak dan jurnalistik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 81–92.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Katolik Parahyangan. (2017). *Analisis demografi pelaku kecurangan korupsi*.
- Wahyu, G., & Supriyanto, J. (2014). *Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi*. *Recidive*, 3(3), 248–258.
- Wibowo, A., Ratnawati, R., Handayani, A. R., Fernando, Z. J., Elizawarda, D., Indriyanti, D., ... & Mutaqin, Z. Z. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Yanthy, N., Simatupang, A., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). *Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Hukum*, 5(2003), 189–197.

- Yanti, R. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1).
- Yustisia, D., & Putri, A. (2024). Peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1, 75–82.
- Zakariya, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenali modus operandi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2).